

KOORDINASI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANG UNAN JALAN NASIONAL DI KABUPATEN ENDE

by Maria Lidia Tai 1111700057

Submission date: 24-Jul-2021 09:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 1623311183

File name: FISIP_1111700057_MARIA_LIDIA_TAI.docx (38.47K)

Word count: 1855

Character count: 12196

KOORDINASI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN NASIONAL DI KABUPATEN ENDE

3 Maria Lidia Tai
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : ml3837839@gmail.com

3 Maria Lidia Tai
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : ml3837839@gmail.com

1 **ABSTRAK** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende, serta apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam koordinasi ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memerlukan informan sebanyak 6 orang. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi.

1 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende belum sepenuhnya efektif dikarenakan terhalang oleh masalah jaringan di Kabupaten Ende yang masih terlihat tidak cukup baik sehingga informasi yang dibutuhkan cukup terlambat. Tidak dengan hal itu, komunikasi yang dilakukan juga lancar baik komunikasi langsung. Pemerintah Pusat maupun daerah sadar betapa pentingnya koordinasi, dan koordinasi sangatlah penting antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar proses pembangunan jalan nasional di kabupaten Ende dapat berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci : *koordinasi, pembangunan jalan nasional*

ABSTRACT This study aims to find out how the coordination between the central government and local governments in the construction of national roads in Ende Regency, as well as what are the supporting and inhibiting factors in this coordination. In this study using qualitative research methods by requiring as many as 6 informants. Data collection techniques used are in-depth interviews, observation and documentation.

The results of this study indicate that the communication made by the central government and local governments in the construction of national roads in Ende Regency has not been fully effective because it is hindered by network problems in Ende Regency which still look not good enough so that the information needed is quite late. Not with that, the communication that was carried out was also smooth, both direct communication. The central and local governments are aware of the importance of central coordination and important assistance between the government and local governments so that the national road development process in End Regency can run optimally.

Keywords: *coordination, national road construction*

PENDAHULUAN

Berdasarkan UUD 1945, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan

masyarakat yang adil dan makmur, maka kegiatan pembangunan memegang peranan penting bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.

Sejalan dengan pertumbuhan dan pengembangan pembangunan nasional di era globalisasi ini, perkembangan pembangunan di Kota Ende juga berkembang pesat, salah satunya di bidang infrastruktur jalan. Dalam penelitian ini, jalan yang dimaksud adalah jalan nasional yaitu jalan yang meghubungkan antara Kabupaten Ende dengan Kabupaten Nangakeo dan Kabupaten Ende dengan Kabupaten Sikka. Dalam pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende, hingga saat ini terlihat beberapa perubahan yang sudah dibuat disepanjang Jalan Nasional di Kabupaten Ende, meskipun beberapa masih terlihat kerusakan dan sempitnya jalan pada bagian Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka. Dalam pembangunan jalan nasional ini, tentu adanya koordinasi pihak-pihak yang berkaitan dalam pembangunan. Dalam hal ini yaitu koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi adalah suatu proses dimana pemimpin mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara unit-unit dibawahnya dan menjamin kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Suatu tindakan pelaksanaan yang terkoordinasikan berarti kegiatan para kelompok pejabat menjadi serasi, seirama dan terpadu.

Dalam pencapaian tujuan dalam pelaksanaan pembangunan jalan nasional, masalah yang dihadapi satker pelaksanaan jalan nasional adalah miskoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengakibatkan beberapa proyek tidak berjalan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan sehingga tidak berjalan dengan efektif. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik meneliti tentang “ Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Jalan Nasional di Kabupaten Ende “

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Menurut Satori dan Komariah (2011:23): Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat

deskriptif seperti proses suatu langkah kerja formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya dan lain sebagainya

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT. Subyek dalam penelitian ini yaitu kepala Satker dan beberapa pegawai yang berada di Kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT. Dalam penelitian ini data dilakukan dengan pengamatan, wawancara yang dilakukan dengan pegawai serta dokumentasi yang didapat dari hasil wawancara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Ende merupakan Kabupaten yang berada di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia dengan luas Kabupaten 2.046,50 km² dan populasi 270.207 jiwa. Kota Kabupaten ini adalah Kabupaten Ende. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT atau yang disingkat Satker ini merupakan Kantor dibawah Naungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kementrian PUPR dengan bersumber dana APBN yang ditempatkan di Kota Ende.

Luas wilayah jalan nasional yang dikerjakan oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional dengan ruas 547, 11 km yang meliputi wilayah dari Gako-Aegela, Aegela- Batas Kota Ende- Wolowaru, Wolowaru-Batas Kota Maumere, Maumere-Waerunu, Waerunu-Larantuka, Larantuka-Balaorin. Kabupaten Ende sendiri memiliki ruas jalan nasional 8.565 m, yang meliputi wilayah Ende- Wolowaru.

Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Jalan Nasional di Kabupaten Ende

Dalam koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangnan jalan nasional di Kabupaten Ende, dapat dijelaskan dengan indicator koordinasi yaitu Komunikasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan (komitmen) dan kuantuitinitas perencanaan.

Komunikasi adalah bagaimana dalam hal menunjang koordinasi yang baik adalah perlu adanya koordinasi yang baik sehingga koordinasi berjalan lancar serta menunjang berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Satker Bapak Sutrisno terkait komunikasi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam pembangunan jalan yaitu “ Komunikasi yang dijalankan dengan bagian daerah berjalan dengan cukup baik. Koordinasi yang dibuat sesuai dengan standar operasional (SOP) yang mereka miliki. Untuk komunikasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah Kabupaten Ende sejauh ini cukup baik karena adanya komunikasi langsung, tetapi karena sudah 1 tahun belakangan adanya pandemic komunikasi tetap berjalan tetapi menggunakan via telephone ataupun media sosial seperti zoom dan WA. Sehingga dalam pertemuan jika terdapat pelebaran ataupun kerusakan diekitaran jalan nasional, satker ini juga berhak dalam pemeliharaan itu dan tentu ada komunikasi antara satker dengan pemerintah daerah. Komunikasi ini tidak secara langsung harus via zoom apalagi saat pandemic seperti ini. Dan masalah yang terjadi dalam komunikasi ini ada pada jaringan ataupun koneksi internet sehingga tidak terlalu bagus. Tetapi komunikasi tetap berjalan dengan baik, dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu dalam berkoordinasi sangatlah penting, baik komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung. Tetapi dalam hal berkomunikasi dengan bagian pusat, kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT berjalan cukup baik walaupun kendala jaringan tetapi tidak menghambat komunikasi diantara mereka

Kompetensi Partisipan adalah keterlibatan pihak-pihak yang berwenang dan mengawasi jalannya koordinasi dalam pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende yaitu bagian pusat kementerian PUPR, balai yang menaungi satker dan bagian daerah sebagai pemilik lahan yang akan dibangun Jalan

Nasional di Kabupaten Ende. Dari hasil wawancara dengan Bapak Rusdy selaku Pelaksana Administrasi. Keterlibatan dalam pembangunan ini sangat penting. Contohnya terjadi kerusakan atau bencana yang terjadi disekitaran jalan nasional maka Satker akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Ende dalam penerbitan surat pernyataan Bupati serta adanya dokumenasi sebagai bukti bencana tersebut, sehingga satker merencanakan penanganan dan memperkirakan kebutuhan biaya yang akan dikeluarkan. Dan beberapa bulan yang lalu juga Kasatker berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pemasangan lampu jalan disekitar Jalan Gatot Subroto dan itu mendapat persetujuan dari pemerintah daerahnya juga. bahwa keterlibatan pemerintah dalam pembangunan jalan nasional ini di Nilai cukup baik. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah melakukan koordinasi dalam pemenuhan fasilitas sehingga disepanjang badan jalan nasional sudah disiapkan pengaman jalan dan lampu-lampu penerang disetiap wilayah jalan nasional bagian perbatasan yang diadakan dibagian satker.

Kesepakatan dan komitmen adalah bentuk kesepakatan dan sanksi yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende. Dari hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Kesepakatan dan komitmen dalam pembangunan jalan nasional ini tentu ada, sehingga pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende dapat berjalan dengan Efektif. Dalam pembangunan jalan nasional ini tentu adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Satker dengan pemerintah daerah itu sendiri. Seperti jika terjadi kerusakan pada jalan nasional dan butuhya pelebaran di jalan nasional tetap adanya pernyataan dari pemerintah daerah kepada satker untuk memelihara jalan tersebut dan ketika kami mengerjakan proyek tersebut komitmen kami mengerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah kami buat dan dana yang kami keluarkan merupakan dari dana APBN

Kontinuitas Perencanaan adalah umpan balik dan perubahan yang dilakukan antara Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat terkait kerjasama dalam pembangunan Jalan Nasional di Kabupaten Ende.

Koordinasi Satker dalam perencanaan yang berkelanjutan akan memiliki hasil yang baik, perencanaan yang berkelanjutan dari hasil kesepakatan dalam upaya pembangunan jalan nasional mampu dijalankan dengan koordinasi yang efektif.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Irma, terkait Perencanaan yang berkelanjutan tentu ada dalam pembangunan jalan nasional ini. Dan perencanaan ini sudah diepakati oleh pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. Seperti adanya bencana alam seperti tanah longsor, itu merupakan perencanaan jangka panjang yang harus dilakukan Satker ini dalam hal rehabilitasi, rekomendasi, rekonstruksi semuanya itu dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Juga.

Segala bentuk kontinuitas perencanaan sangat diperlukan, mengingat hasil jangka panjang yang diharapkan oleh semua pihak, jika program jangka pendek saja yang berjalan maka tidak akan menghasilkan nilai yang positif hanya sekedar saat itu saja, jadi sangat diperlukan perencanaan lanjutam untuk menunjang segala aspek program pembangunan jalan nasional di wilayah Kabupaten

Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Jalan Nasional di Kabupaten Ende

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam koordinasi ini yaitu Dalam koordinasi dengan pemerintah pusat faktor pendukung dalam hal ini yaitu komunikasi yang baik dan lancar dalam hal ini komunikasinya secara langsung. karena dengan komunikasi yang lancar maka koordinasi yang kita lakukan itu akan sesuai harapan dan juga faktor pendukungnya seperti adanya sosial media sebagai alat komunikasi yang efektif

Faktor penghambat yang dialami satker dalam koordinasi dengan pemerintah daerah untuk sekarang selama masa pandemic ini kebanyakan komunikasi yang dilakukan melalui zoom. Di daerah kabupaten Ende ini, terhambat oleh jaringan sehingga pada saat zoom suara yang dikeluarkan tidak cukup jelas.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelesan sebelumnya bahwa dalam koordinasi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende ini berjalan dengan cukup baik sehingga pembangunan Jalan nasional serta masalah-masalahnya dilakukan dengan efektif.

Adapun faktor pendukung dan penghambat koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende yaitu faktor pendukungnya seperti adanya sosial media sebagai alat komunikasi yang efektif serta aktor penghambat yaitu kondisi jaringan yang tidak cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto. (2019, 8 21). Pengertian Jalan Menurut Undang-undang. Retrieved 2 12, 2021, from paralegal.id:
- Irmadiana. (2020, 11 23). Pengertian Koordinasi Tujuan, Jenis dan Ruang Lingkup. Retrieved 4 15, 2021, from accurate.id: <https://accurate.co.id>
- Kais, A. (2020, 5 28). Satker PJN IV siap Benahi Jalan Nasional di Kota Ende. Retrieved 3 19, 2021, from regional.flores: <http://regional.floreseditorial.com>
- Moekijat, D. (1994). Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis). Bandung: 1994.
- Putri, N. (2016). Koordinasi Dalam Pemeliharaan Jalan Nasional di Kota Pekanbaru. Administrasi Publik, 1-9.
- Tegila, R. (208). Peranan Camat Sebagai Koordinator Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bolangilang Kabupaten Bolang. Jurnal Eksekutif, 41-56.

Welly. (2018). Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Secara Partisipatif di Desa Manuar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kuti Timur. Ilmu Pemerintahan, 50-63.

KOORDINASI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANG UNAN JALAN NASIONAL DI KABUPATEN ENDE

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scribd.com

Internet Source

6%

2

stialan.ac.id

Internet Source

3%

3

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Student Paper

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off